

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2001-2010

SRI WAHYUNI



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2001-2010

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**SRI WAHYUNI
A11108010**



pada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2001-2010

disusun dan diajukan oleh

SRI WAHYUNI
A11108010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 22 Februari 2013

Pembimbing I



Dr. H. Madris., DPS., M. Si
NIP. 19601231 1988111 002

Pembimbing II



Dr. Paulus Uppun., SE., MA
NIP. 19561231 1985031 015

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA
NIP 19630625 198703 2 001

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2001-2010

Disusun dan diajukan oleh

SRI WAHYUNI
A11108010

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **5 Maret 2013** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. H. Madris, DPS, M.Si.	Ketua	1. 
2	Dr. Paulus Uppun, SE.,MA	Sekretaris	2. 
3	Dr. Abdul Rahman Razak, SE.,MA	Anggota	3. 
4	Dr. Indraswati T.A.R., SE.,MA	Anggota	4. 
5	Muh. Agung Ady, SE., M.Si.	Anggota	5. 

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA
NIP 19630625 198703 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SRI WAHYUNI
Nim : A 111 08 006
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi/S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2001-2010

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

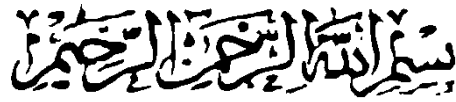
Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, Mei 2013

Yang membuat pernyataan,

Sri Wahyuni

PRAKATA



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrobbil alamiin...Segala hanya Puji Milik Allah, Sang penguasa Alam semesta, yang menggenggap jiwa setiap manusia, Selawat dan salam senantiasa tercurah hanya kepada Nabi saw, beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.aamiin.

Atas Izin Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMAPATAN KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2001-2010”** Pertolongan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini hanya penulis sandarkan kepada Allah, kesabaran dan keikhlasan di dalam proses pengerjaannya semoga menjadi pahala , pada akhirnya penulis berharap di setiap proses yang penulis tempuh senantiasa berpayung Ridho dariNya.

Dengan penuh ketulusan dan rasa syukur penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Drs.Kamaruddin,Dp,Ak dan St.Suhrah BA, Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, perhatian, pengertian dan do'a yang senatiasa tercurah, rasa- rasanya penulis tak kan pernah bisa membalas sebanding apa yang telah ibu dan bapak berikan, semoga selalu di Sayang Allah..
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak DR.Paulus Uppun,SE.MA. selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing Penulis dalam penyusunan skripsi.

4. Bapak DR.Madris.DPS.,M.Si selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Parman dan Ibu Ros sebagai staf pegawai Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi atas segala info dan bantuannya kepada penulis.
6. Buat kakak pertama ku Sukmawati,S.Farm.Apt terimakasih atas suplemen kesehatannya Alhamdulillah manjurr ☺
7. Buat kakak kedua ku Sulfiana,S.Si yang sebentar lagi akan mengenakan Agamanya, terima kasih atas bantuan Logistiknya...☺
8. Buat adik bungsu ku Miswarhadi... setelah gelap pasti akan cahaya, saya percaya itu.
9. Buat Murabbiah dan teman-teman Lingkaran saya...Jazaakumullah atas semangat kalian..uhibbukum Fillah ☺
10. Buat Keluarga Besar Dakwah Sekolah Makassar...tempat pertamaku berkiprah UntukNya..Afwan wa syukran atas semuanya.
11. Buat teman SMA ku bestfriend ku Ukhti Fardhilah Kasim.SE Alhmdulillah SE meka juga... terimakasih atas semangat dan support yang begitu berharga, mari melangkah ke agenda selanjutnya ☺
12. Buat Keluarga Besar FoSEI unhas dan FoSSEI Reg.SulSel ...Terimakasih atas ukhuwah yang indah Terus berjuang membumikan Ekonomi Islam, Salam Ekonom Rabbani , Bisa.. !!!
13. Buat Keluarga Besar ForSil 08 saya suka sekali dengan kutipan “semoga Toga tidak memisahkan kita” selamat berjuang untuk pascakampuz ☺
14. Buat akhwat Ekonomi... Saya mencintai Kalian karena Allah ☺

15. Buat adik-adik lingkaran saya... Terimakasih atas semangat, dan do'a kalian...kehadiran,senyum dan tawa kalian setiap melingkar adalah spirit baru untuk terus melangkah dan memperbaiki diri.
16. Buat teman2 Iconic 08 salam sukses buat semuanya..semoga kita bisa membanggakan almamater kampus dan fakultas tercinta.
17. Buat teman-teman KKN gel 81 (Bontoa Crew) terimakasih atas kerjasamanya selama menunaikan tri darma perguruan tinggi.
18. Buat wiwin dan dewi terima kasih atas bantuannya kepada penulis..akrab dengan PSKMP selama menyusun ☺
19. Buat imha, reni, eva dan lisa, indah, teman seperjuangan menyusun TA, akhirnya tepat tanggal 05 Maret 2013 kita Sah menyandang gelar SE... *big hug untuk kalian.. Alhamdulillah ☺
20. Buat Sukma,Eka, nana, ipha, dan bams yang telah lebih dulu angkat kaki dari fakultas..salam sukses, unforgettable moment kerja tugas kuliah di pondokannya nana....☺

Penulis berharap agar segala do'a, bimbingan, bantuan, saran, inspirasi, dan motivasi yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT., Amin.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk lebih menyempurnakan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat. Dan berkah..

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Mei 2013

Penulis

ABSTRAK

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Sektor Pertanian di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010

Factors that affect job opportunities in the agriculture sector in South Sulawesi period 2001-2010

Sri Wahyuni
Madris
Paulus Uppun

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat PMA, tingkat PMDN, dan belanja pemerintah terhadap kesempatan kerja sektor pertanian melalui output sektor pertanian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder berupa data time series dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 tentang tingkat PMA, tingkat PMDN pada sektor pertanian, belanja pemerintah pada sektor pertanian, output sektor pertanian, dan kesempatan kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut diolah menggunakan software computer "SPSS 16.0" dengan metode analisis regresi linear berganda secara two stage.

Hasil penelitian dan estimasi data melalui metode regresi linear berganda secara two stage menunjukkan bahwa Pengaruh tingkat PMA dan PMDN terhadap kesempatan kerja sektor pertanian melalui output sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang negatif, sedangkan belanja pemerintah terhadap terhadap kesempatan kerja melalui output sektor pertanian berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif

Kata kunci : Tingkat PMA, tingkat PMDN, belanja pemerintah sektor pertanian, output sektor pertanian, kesempatan kerja sektor pertanian.

This study aims to determine how much influence the level of FDI, the level of domestic investment, and government spending on agricultural employment through agricultural output.

The types of data used in this study are secondary data. Secondary data in the form of time series data from 2001 to 2010 on the level of FDI, the level of domestic investment, government spending on agriculture, agricultural output, and employment in the agricultural sector in the province of South Sulawesi. The data is processed using computer software "SPSS 16.0" with multiple linear regression analysis method in two stages.

The results and the estimation of data through multiple linear regression method in two stage shows that the effect of FDI and domestic investment on employment levels of the agricultural sector through the output of the agricultural sector and a significant negative effect, government expenditure on the employment by sector output pertanian positive and significant at the level confidence ($\alpha = 10\%$), while no significant effect on the level of domestic investment opportunities through agricultural output.

Keywords : The level of FDI (Foreign Domestic Investment), the level of domestic investment, government spending, agriculture, agricultural output, agricultural labor opportunities.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Perdebatan Konsep Tenaga Kerja	9
2.1.2. Perdebatan Konsep Pertanian.....	13
2.1.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sektor Pertanian	13
2.1.2.2. Peranan Sektor Pertanian Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan rakyat	18
2.1.3. Keterkaitan PMDN dengan Kesempatan kerja.....	23
2.1.4. Keterkaitan PMA dengan Kesempatan kerja.....	25
2.1.5. Keterkaitan Belanja Pemerintah Sektor Pertanian dengan Kesempatan Kerja.....	27
2.1.6. Keterkaitan Output Sektor Pertanian dengan Kesempatan Kerja.....	29
2.2. Studi Empiris	31
2.3. Kerangka Pikir	33
2.4. Hipotesis.....	36

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1.	Daerah Penelitian.....	37
3.2.	Jenis dan Sumber data	37
3.3.	Metode Pengumpulan Data	37
3.4.	Metode Analisis Data	38
3.5.	Definisi Operasional.....	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1.	Letak Georafis.....	40
4.2.	Perkembangan Variabel yang Diteliti	42
4.2.1.	Perkembangan Tingkat PMA	42
4.2.2.	Perkembangan Tingkat PMDN	45
4.2.3.	Perkembangan Belanja Pemerintah di Sektor Pertanian	47
4.2.4.	Perkembangan Output Sektor Pertanian	48
4.2.5.	Perkembangan Kesempatan Kerja.....	50
4.3.	Analisis Data.	52
4.3.1.	Analisis Pengaruh Tingkat PMA, Tingkat PMDN, Belanja Pemerintah dan Output Sektor Pertanian terhadap Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian	52
4.4.	Uji R Square (R^2)	55
4.5.	Uji T Statistik.	56
4.6.	Uji F Statistik	57
4.7.	Koefisien Determinasi Majemuk (R^2) dan koefisien korelasi (R).....	57
4.8.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1.	Kesimpulan.....	59
5.2.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....		61
LAMPIRAN		63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peranan Setiap Sektor Ekonomi Dalam Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011 (Persentase).	3
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2011 (Milyar Rupiah)	32
Tabel 4.2	Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2007-2011(%).....	33
Tabel 4.3	Komponen Perubahan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2007 dan 2011 (Milyar Rupiah).	36
Tabel 4.4	Persentase Komponen Perubahan PDRB Menurut Provinsi Sulawesi Selatan Lapangan Usaha, 2007 dan 2011 (Milyar Rupiah).....	38
Tabel 4.5	Komponen Perubahan dan Pergeseran Bersih PDRB Provinsi Sulawesi Selatan menurut Lapangan Usaha, 2007 dan 2011 (Milyar Rupiah).....	47
Tabel 4.6	Komponen Perubahan dan Kenaikan Aktual PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha, 2007 dan 2011 (Persen)	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep pemikiran	23
Gambar 4.1 Hasil Shift Share Analisis	36
Gamabr 4.2 Grafik Proportional Shift (PS) dan Diference Shift (DS) Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2007-2011	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi ekonomi yang efisien dalam kesempatan kerja ,pemerataan kesempatan berusaha, dan distribusi pendapatan yang merata dan adil tidak akan terwujud apabila dalam pelaksanaannya hanya tertuju pada satu sektor saja,akan tetapi dalam pelaksanaan starategi pembangunan dewasa ini kita diperhadapkan pada suatu masalah yakni masalah kependudukan, dalam hal ini adalah pertumbuhan penduduk yang masih tergolong tinggi sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia yang dapat menampung tenaga kerja tersebut belum mencukupi.

Dengan melihat jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang kian bertambah menjadikan kesempatan kerja tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia hal ini disebabkan karena belum berfungsinya semua sektor kehidupan dengan baik dan belum meratanya pembangunan.

Meningkatnya angka pengangguran di indonesia disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja .adanya kesenjangan kerja antara angkatan kerja dan lapangan kerja tersebut berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik secara spasial antara desa-kota maupun secara sektoral .terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan .Kesenjangan upah/pendapatan yang besar antara desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota (Fadillah, 2006).

Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau disebut pula pekerja. Bekerja yang dimaksud disini adalah paling sedikit satu jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu.

Masalah kesempatan kerja tidak dapat terlepas dari pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja .Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak pada laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi pula (*potential labour supply*) (Fadillah, 2006).

Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia. Kenyataan secara riil sumbangsih sektor pertanian dalam perekonomian diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional tahun demi tahun mengecil, hal ini bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu secara absolut tetap selalu meningkat. Kecuali itu peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menandalkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

Indonesia yang merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini memungkinkan Indonesia menjadi negara agraris terbesar di dunia. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat (Srirande,2012).

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2010

Lapangan Usaha	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Pertanian	18,513.26	20,900.36	12,923.42	13,528.69	13,809.80
Pertambangan dan Penggalian	5,249.99	5,894.00	4,034.94	3,852.79	4,491.34
Industri Pengolahan	8,245.34	9,158.55	6,241.44	6,468.79	6,869.43
Listrik, gas dan air bersih	629.31	721,96	451.00	490,45	529.82
Bangunan	2,790.79	3,204.10	2,328.42	2,656.77	2,900.27
Perdagangan, hotel dan Restaurant	9,507.87	10,986.58	7,034.56	7,792.10	8,698.81
Pengangkutan dan Telekomunikasi	5.102,84	5,769.06	3,651.37	4,023.68	4,619.93
Keuangan, Persewaan dan jasa	3,675.19	4,285.18	2,881.07	3,203.98	3,742.09
Jasa-Jasa	7,188.24	8,352.14	5,308.83	5,308.83	5,535.55

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka 2011, BPS

Dapat di lihat dari data PDRB Sulawesi Selatan diatas dalam kurung waktu 5 tahun dari tahun 2006-2010 lapangan usaha pertanian menyumbang lebih besar terhadap PDRB Sulawesi Selatan dibandingkan lapangan usaha lainnya, yang menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi agraris.

Hal ini terlihat pada tahun 2006, sumbangan lapangan usaha pertanian sebesar 18,513.26 (miliar Rupiah) dan mengalami penurunan di tahun 2008 sebesar 12,923.42 (miliar Rupiah). Penurunan tersebut mulai mengalami peningkatan kembali secara perlahan-lahan di tahun 2009 sebesar 13,528.69 (miliar rupiah) menjadi 13,809.80 (miliar rupiah) di tahun 2010.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 - 2013 diperkirakan mencapai 7,45 persen dan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2013 diperkirakan sebesar 7,40 persen dan diharapkan peningkatan investasi, industri pengolahan hasil pertanian dan sektor-sektor lainnya dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama periode 2008- 2013 hingga akhirnya mampu membuka kesempatan kerja yang lebih luas

Kesempatan kerja juga di dorong oleh investasi yang di lakukan pemerintah maupun pihak swasta sebab dengan adanya investasi akan menambah alat-alat produksi dan modal usaha yang akan menambah kapasitas produksi yang akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Dalam upaya menjaga kesinambungan dan kelanjutan pembangunan nasional yang telah dilakukan selama ini peran pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, cukup besar dan menonjol disamping pelaku ekonomi lainnya. Untuk itu diperlukan dana investasi yang cukup besar guna mempertahankan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dengan meningkatnya investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan output dan nilai tambah, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja.

Investasi mempunyai dua peran dalam perekonomian, secara makro yang diungkapkan oleh Samuelson (2004). Pertama, investasi merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan berubah- ubah, yang kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan juga berakibat pada output dan penggunaan tenaga kerja. Kedua, invetasi menghimpun akumulasi modal, yaitu

dengan menambah peralatan modal yang berguna, output yang potensial suatu bangsa bertambah dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan meningkat. Elemen penting dalam memahami investasi adalah revenue (hasil), biaya dan ekspektasi .

Perkembangan investasi di provinsi Sulawesi Selatan berjalan seiring dengan perkembangan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya yaitu faktor internal ekonomi dan eksternal, hal ini terlihat dari rencana PMA dan PMDN yang telah disetujui oleh pemerintah dalam realisasinya mengalami keadaan yang naik turun dari tahun ke tahun, Menurut data realisasi PMA dan OPMDN dari BKPM, terhitung jumlah nilai PMA yang teralisasi pada tahun 2004 adalah 9 proyek dengan nilai investasi 11.449 ribu US dollar. Sedangkan jumlah proyek PMDN yang teralisasi adalah 4 proyek dengan nilai investasi sebesar 133.232 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2005, PMA mengalami kenaikan dengan jumlah proyek yang teralisasi sebanyak 11 proyek dengan nilai investasi 213.803 ribu US dollar. Hal yang sama terjadi pada PMDN dengan 8 proyek yang teralisasi dan nilai sebesar 160.585

Pada skala perekonomian makro daerah, pertumbuhan ekonomi diukur melalui pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Berdasarkan pendekatan Keynes tersebut bahwa pertumbuhan pendapatan ditentukan oleh peningkatan permintaan pengeluaran faktor-faktor penentunya yaitu konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor dan impor. Hubungan antara pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi menarik untuk dikaji ketika hasil kajian Solow mengatakan bahwa investasi bukanlah satu-satunya kunci penentu pertumbuhan ekonomi, Easterly 2002.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai "motor" sedangkan pemerintah propinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut **Djojohadikusumo (1993)** dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi.

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat membantu, terutama setelah terjadi krisis ekonomi tahun

1997. Pemerintah menetapkan kebijakan pokok mengenai arah perekonomian melalui perencanaan, kebijakan pemerintah dan pengaturan. Pemerintah harus melakukan pengeluaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan, (Sicat, G.P dan Arndt, H. W:1991).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro (Basri dan Subri, 2003).

Berdasarkan sumber data Departemen Keungan yaitu dalam APBD , realisasi pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.Pada tahun 2008 realisasi pengeluaran pemerintah sebesar 52.689.008.991 juta rupiah, kemudian meningkat cukup besar pada tahun 2009 yaitu sebesar 82.370.463.701 juta rupiah kemudian pada tahun 2010 meningkat lagi dengan perubahan yang juga cukup signifikan yaitu sebesar 105.778.567.623 juta rupiah.

Berdasarkan uraian di atas maka,penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat topik **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Sektor Pertanian Di Sulawesi-Selatan Periode 2001-2010“**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut yaitu Seberapa besar pengaruh PMA, PMDN, dan Belanja Pemerintah pada sektor Pertanian terhadap kesempatan kerja di Sulawesi Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PMA, PMDN, dan Belanja Pemerintah pada sektor Pertanian terhadap kesempatan kerja di Sulawesi Selatan periode 2001-2010.

1.4 Manfaat penelitian.

Setelah penelitian ini dilaksanakan di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh PMA terhadap kesempatan kerja pada sektor pertanian di Sulawesi Selatan periode 2001– 2010.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh PMDN terhadap kesempatan kerja pada sektor pertanian di Sulawesi Selatan periode 2001 – 2010.
3. Untuk memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh Belanja pemerintah pada sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di Sulawesi Selatan periode 2001– 2010.
4. Dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan dalam penulisan karya ilmiah pada bidang dan objek yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Perdebatan Konsep Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam proses produksi selain sumber daya alam, modal dan teknologi. Karena tenaga kerjalah yang menggerakkan sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang. Penyediaan tenaga kerjapun sifatnya terbatas karena tidak semua penduduk merupakan tenaga kerja. Hanya penduduk yang telah mencapai umur minimum tertentu yang bisa di anggap sebagai tenaga kerja potensial atau angkatan kerja (Fadillah, 2006).

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi Nasional dan khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang tergolong miskin; sehingga kelompok tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya. Aktivitas ketenagakerjaan diterapkan melalui pembinaan yang menuntut kemampuan, keahlian dan keterampilan tenaga kerja untuk menggunakannya. Penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan berjenjang, berlanjut dan berkait yang bertujuan meningkatkan kesetiaan dan ketaatan; menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan kualitas, keterampilan serta memupuk semangat dan semangat dan moral pekerja, mewujudkan iklim kerja yang kondusif, memberikan

pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja (Sastrohadiwiryo, 2004).

Tenaga kerja adalah salah satu unsur dari perusahaan dan memiliki peran yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam kelancaran proses kerja dalam memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan. (Fadillah, 2006).

Ketenagakerjaan menjadi tanggungjawab perusahaan untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk produktif menjalankan aktivitas kerjanya. Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi yang lain seperti tanah, modal dan lain-lain. Maka manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut. Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan perkerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut (yang mengandung arti adanya kesempatan), kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja (Fadillah, 2006).

Kebutuhan tenaga kerja nyata-nyata diperlukan oleh perusahaan/lembaga menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu. Data kesempatan kerja secara nyata sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah kesempatan kerja didekati melalui banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja. Kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dengan demikian jumlah penduduk

Indonesia yang cukup besar dapat menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan proses produksi dan juga sebagai pasar barang dan jasa (Fadillah. 2006).

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam ketenagakerjaan adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand for labour*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labour*) pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa: 1. Lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labour*). 2. Lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labour*).

Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, jumlah penduduk yang banyak tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan.

Usia Kerja adalah suatu tingkat umur seseorang yang diharapkan sudah dapat bekerja dan menghasilkan pendapatannya sendiri. Usia kerja ini berkisar antara 14 sampai 55 tahun. Selain penduduk dalam usia kerja, ada juga

penduduk di luar usia kerja, yaitu di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. Penduduk yang dimaksud yaitu anak-anak usia sekolah dasar dan yang sudah pensiun atau berusia lanjut

Bagian lain dari penduduk dalam usia kerja adalah bukan angkatan kerja. Yang termasuk di dalamnya adalah para remaja yang sudah masuk usia kerja tetapi belum bekerja atau belum mencari pekerjaan karena masih sekolah. Ibu rumah tangga pun termasuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja.

Penduduk dalam usia kerja yang termasuk angkatan kerja, dikelompokkan menjadi tenaga kerja (bekerja) dan bukan tenaga kerja (mencari kerja atau menganggur). Tenaga Kerja (man power) adalah bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikut serta dalam proses produksi serta menghasilkan barang atau jasa.

Lewis (Subri, 2003) dalam teorinya mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah, di mana kelebihan pekerja satu sektor ekonomi akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Lebih murah biaya upah asal pedesaan terutama dari sektor pertanian akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, maka kelebihan penawaran pekerja di sektor pertanian akan terserap.

(Subri, 2003) dalam teorinya mengemukakan bahwa ada tiga tahapan pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan tenaga kerja. Tahapan tersebut adalah: a). Para penganggur semu (yang tidak menambah *output* pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. b). Tahap di mana pekerja pertanian menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari

upah institusioanal yang mereka peroleh dapat pula dialihkan ke sector industri. c). Tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *output* lebih besar dari perolehan upah institusional, maka dalam kondisi seperti ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus sejalan dengan pertumbuhan *output* dan perluasan usahanya.

Harrod-Domar (Todaro, 2000) dalam teori pertumbuhannya menyatakan bahwa secara definitif tingkat pertumbuhan *output* (Y) dikurangi dengan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (Y/L) kurang lebih sama dengan pertumbuhan kesempatan kerja (L).

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau *demand* dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. Besar penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat *employment*) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut. Selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Dalam ekonomi Neoklasik bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah. Sebaliknya permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang bila tingkat upah meningkat. (Suparmoko, 2000).

2.1.2 Perdebatan Konsep Pertanian

2.1.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sektor Pertanian

Sektor pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pandangan nasional menurut lapangan usaha atau sektor produksi ialah pertanian dalam arti luas. Di Indonesia, sektor dipilih-pilih lagi menjadi lima subsektor (Soekartawi, 2005)

yaitu:

1. Subsektor tanaman pangan

Subsektor tanaman pangan sering juga disebut subsektor pertanian rakyat, Disebut demikian karena tanaman pangan diusahakan oleh rakyat bukan oleh pemerintah atau perusahaan. Subsektor ini mencakup komoditas- komoditas bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela eambat, kacang tanah, kedelai, serta sayur-sayuran dan buah-buahan.

2. Subsektor Perkebunan

Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Yang dimaksud dengan perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat dan biasanya dalam skala kecil dengan teknologi yang sederhana. Sedangkan perkebunan besar adalah kegiatan perkebunan yang dijalankan perusahaan perkebunan berbadan hukum. Tanaman perkebunan seperti karet, kopra, kopi, teh, tembakau, cengkeh, kapok, kapas, coklat, kelapa sawit, tebu, dan lain-lain.

3. Subsektor Kehutanan.

Subsektor kehutanan terdiri atas tiga macam kegiatan yaitu kayu, pengambilan hasil hutan dan perburuan,. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu- kayu glondongan, kayu bakar, bambu. Hasil hutan meliputi damar, rotan, getah kayu, kulit kayu, akar-akaran dan umbi kayu. Sedangkan kegiatan perburuan menghasilkan binatang-binatang liar seperti rusa, penyu, ular, buaya, dan juga madu.

4. Subsektor Peternakan.

Subsektor peternakan mencakup kegiatan beternak dan pengusahaan hasil-hasilnya. Subsektor produksi ternak besar dan kecil seperti telur, susu, wool dan hasil pemotongan hewan.

5. Subsektor Perikanan.

Subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah, dan keramba serta pengolahan sederhana atas produk-produk perikanan (pengeringan dan pengasinan). Komoditas yang tergolong pada subsektor ini tidak terbatas hanya pada ikan tetapi juga udang, kepiting, ubur-ubur dan sebagainya.

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia karena alasan-alasan tertentu (Soekartawi, 2005) diantaranya :

1. Sektor pertanian masih penyumbang PDB terbesar
2. Penyerap angkatan kerja terbesar sekitar 50 % sehingga mampu mengurangi jumlah orang miskin dipedesaan.
3. Sektor pertanian mampu menyediakan keragaman menu pangan dan karenanya sektor pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat.
4. Sektor pertanian mampu mendukung sektor industri baik industri hulu maupun industri hilir.
5. Ekspor hasil pertanian yang semakin meningkat dan penyumbang devisa terbesar.

Sektor pertanian merupakan sektor yang pasif dalam pembangunan ekonomi, Tetapi sektor pertanian mendukung sektor yang lebih aktif yaitu sektor industri. Menurut Mubyarto (1977), mengatakan bahwa yang membedakan

sektor pertanian dengan sektor yang lainnya (industri) adalah :

1. Produksi pertanian sangat kurang pasti dan risikonya besar karena tergantung pada alam yang kebanyakan diluar kekuasaan manusia untuk mengontrolnya sedangkan industri tidak.
2. Pertanian memproduksi bahan-bahan makanan pokok dan bahan-bahan mentah yang dengan majunya ekonomi dan tingkat hidup manusia permintaanya tidak akan naik seperti pada permintaan barang dan jasa sehingga elastisitas harga atas permintaan dan penawaran hasil-hasil pertanian jauh lebih kecil daripada hasil-hasil industri
3. Pertanian dalam bidang usaha dimana tidak hanya faktor-faktor ekonomi saja yang menentukan tetapi juga faktor sosiologi, kebiasaan dan lain-lain.

Selain hambatan-hambatan di atas tentang sulitnya untuk mengembangkan faktor pertanian, adapun persoalan-persoalan lain yang dihadapi pada sektor pertanian adalah :

1. Jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan dalam pertanian. Adanya jarak waktu (gap) antara pengeluaran yang harus dilakukan para pengusaha pertanian dengan penerimaan hasil penjualan. Jarak waktu ini disebut "gestation period" yang dalam bidang pertanian jauh lebih besar dari pada dalam bidang industri sekali produksi telah berjalan maka penerimaan dari penjualan akan mengalir setiap hari sebagaimana mengalirnya hasil produksi. Tidak dengan pertanian harus menunggu 5-6 bulan sebelum panennya dapat dijual.

2. Pembiayaan pertanian.

Persoalan yang paling sulit dengan ekonomi pertanian adalah persoalan pembiayaan. Dengan titik tolak pada kenyataannya adanya kemelaratan yang luas di kalangan petani, keterlibatan mereka pada hutang, baik hutang biasa maupun dengan sistem ijon. Orang mengatakan bahwa petani tidak dapat meningkatkan produksinya karena kekurangan biaya, Petani membutuhkan kredit murah dari lembaga keuangan dan sebagainya.

3. Tekanan penduduk dan pertanian

Menurut Malthus tentang persoalan-persoaln penduduk dan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan manusia akan bahan makanan. Penduduk bertambah lebih cepat daripada pertambahan produksi bahan makanan. Penduduk bertambah menurut deret ukur sedangkan produksi bahan makanan hanya bertambah menurut deret hitung.

Ekonomi pertanian merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dengan ilmu pertanian yang memberikan arti sebagai berikut. *Suatu ilmu yang mempelajari dan membahas serta menganalisis pertanian secara ekonomi, atau ilmu ekonomi yang diterapkan pada pertanian.* (Daniel, 2002; 9) Dengan pengertian ekonomi pertanian yang demikian, ilmu pertanian bukan hanya mempelajari tentang bercocok tanam tetapi suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang pertanian, baik mengenai subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, maupun subsektor perikanan. Ilmu ekonomi pertanian menjadi satu ilmu tersendiri yang mempunyai manfaat yang besar dan berarti dalam proses pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Ekonomi pertanian mencakup analisis ekonomi dari proses (teknis) produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi pertanian, hubungan antar faktor produksi, serta hubungan antara faktor produksi dan produksi itu sendiri. Dalam kebijakan pembangunan nasional, pembangunan pertanian merupakan langkah awal dan mendasar bagi pertumbuhan industri. Salah satu subsektor pertanian yang berkembang adalah subsektor perkebunan.

2.1.2.2 Peranan Sektor Pertanian Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Sektor pertanian dan perdesaan diharapkan sebagai tempat penyerapan tenaga kerja terbesar dalam upaya membantu mengatasi masalah pengangguran. Dengan demikian sektor pertanian dan perdesaan dapat diharapkan menjadi penopang utama sistem perekonomian nasional, sekaligus mendorong ke arah pengentasan kemiskinan.
2. Sektor pertanian dan perdesaan juga berfungsi sebagai penghasil makanan pokok untuk mengurangi ketergantungan pangan kepada pasar dunia sehingga sektor pertanian terkait dengan stabilitas, perekonomian nasional.
3. Peran strategis lainnya dalam pembangunan pertanian dan perdesaan yang tangguh adalah mendorong ekspor dan mengurangi impor produk pertanian, meningkatkan jumlah devisa dan sekaligus akan meningkatkan pembangunan wilayah.
4. Dengan meningkatkan pembangunan pertanian dan perdesaan akan memberikan implikasi kepada peningkatan kinerja sektor industri karena

terdapat keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dengan sektor industri.

5. Mengingat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan dalam perekonomian nasional, maka sudah sewajarnya sektor pertanian dan pedesaan dijadikan motor penggerak pembangunan ekonomi bangsa.
6. Ketahanan pangan merupakan ukuran kemakmuran masyarakat.
7. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dapat menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di negara agraris seperti Indonesia.

Pembangunan Pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia :

- (1) potensi sumberdayanya yang besar dan beragam,
- (2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar,
- (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini
- (4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan

Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk golongan miskin adalah sangat ironis terjadi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian keseluruhan. Disisi lain adanya peningkatan investasi dalam pertanian yang dilakukan oleh investor PMA dan PMDN yang berorientasi pada pasar ekspor umumnya padat modal dan peranannya kecil dalam penyerapan tenaga kerja atau lebih banyak menciptakan buruh tani.

Berdasarkan latar belakang tersebut ditambah dengan kenyataan justru kuatnya aksesibilitas pada investor asing /swasta besar dibandingkan dengan petani kecil dalam pemanfaatan sumberdaya pertanian di Indonesia, maka dipandang perlu adanya grand strategy pembangunan pertanian melalui pemberdayaan petani kecil. Melalui konsepsi tersebut, maka diharapkan mampu menumbuhkan sektor pertanian, sehingga pada gilirannya mampu menjadi sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal pencapaian sasaran :

- (1) mensejahterkan petani,
- (2) menyediakan pangan,
- (3) sebagai wahana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah,
- (4) merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri,
- (5) menghasilkan devisa,
- (6) menyediakan lapangan pekerjaan,
- (7) peningkatan pendapatan nasional, dan
- (8) tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya.

Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan agribisnis bahkan dimungkinkan akan menjadi leading sector dalam pembangunan nasional. Potensi agribisnis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam Pembentukan Produk Domestik bruto , sektor agribisnis merupakan penyumbang nilai tambah (value added) terbesar dalam perekonomian nasional, diperkirakan sebesar 45 persen total nilai tambah.

2. Sektor agribisnis merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar diperkirakan sebesar 74 persen total penyerapan tenaga kerja nasional.
3. Sektor agribisnis juga berperan dalam penyediaan pangan masyarakat. Keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok beras telah berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (food security) yang sangat erat kaitannya dengan ketahanan social (socio security), stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan atau ketahanan nasional (national security).
4. Kegiatan agribisnis umumnya bersifat resource based industry. Tidak ada satupun negara di dunia seperti Indonesia yang kaya dan beraneka sumberdaya pertanian secara alami (endowment factor). Kenyataan telah menunjukkan bahwa di pasar internasional hanya industri yang berbasiskan sumberdaya yang mempunyai keunggulan komparatif dan mempunyai kontribusi terhadap ekspor terbesar, maka dengan demikian pengembangan agribisnis di Indonesia lebih menjamin perdagangan yang lebih kompetitif.
5. Kegiatan agribisnis mempunyai keterkaitan ke depan dan kebelakang yang sangat besar (backward dan forward linkages) yang sangat besar. Kegiatan agribisnis (dengan besarnya keterkaitan ke depan dan ke belakang) jika dampaknya dihitung berdasarkan impact multilier secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian diramalkan akan sangat besar.

6. Dalam era globalisasi perubahan selera konsumen terhadap barangbarang konsumsi pangan diramalkan akan berubah menjadi cepat saji dan pasar untuk produksi hasil pertanian diramalkan pula terjadi pergeseran dari pasar tradisional menjadi model Kentucky. Dengan demikian agroindustri akan menjadi kegiatan bisnis yang paling atraktif.
7. Produk agroindustri umumnya mempunyai elastisitas yang tinggi, sehingga makin tinggi pendapatan seseorang makin terbuka pasar bagi produk agroindustri.
8. Kegiatan agribisnis umumnya menggunakan input yang bersifat renewable, sehingga pengembangannya melalui agroindustri tidak hanya memberikan nilai tambah namun juga dapat menghindari pengurasan sumberdaya sehingga lebih menjamin sustainability.
9. Teknologi agribisnis sangat fleksibel yang dapat dikembangkan dalam padat modal ataupun padat tenaga kerja, dari manajemen sederhana sampai canggih, dari skala kecil sampai besar. Sehingga Indonesia yang penduduknya sangat banyak dan padat, maka dalam pengembangannya dimungkinkan oleh berbagai segmen usaha.
10. Indonesia punya sumberdaya pertanian yang sangat besar, namun produk pertanian umumnya mudah busuk, banyak makan tempat, dan musiman. Sehingga dalam era globalisasi dimana konsumen umumnya cenderung mengkonsumsi nabati alami setiap saat, dengan kualitas tinggi dan tidak busuk dan makan tempat, maka peranan agroindustri akan dominan.

2.1.3 Keterkaitan PMDN dengan Kesempatan Kerja

Menurut teori Klasik bahwa investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi (output).Kaum Klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi.Maka dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.Jadi, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan **(Boediono, 1981)**.

Peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infratraktur dasar yang meliputi telekomunikasi, transportasi, persediaan air yang merupakan kontribusi utama pengeluaran pemerintah yang efisien untuk merangsang investasi sektor swasta. Hubungan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan dengan kesempatan kerja dalam hal ini dilihat dari sisi usaha meningkatkan investasi swasta berperan secara efektif. Terkait dengan itu, pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong investasi swasta dapat menciptakan lapangan usaha yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Menurut definisi yang diberikan oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal dalam negeri

(PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di negara berkembang harus benar-benar aktif dan positif. Karena pemerintah harus mempunyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dalam upaya meningkatkan tingkat kemakmuran rakyatnya. Di Indonesia peran pemerintah dibagi dalam empat kelompok peran (Dumairy, 1996) diantaranya :

1. Peran Alokatif, yakni peranan pemerintah di dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
2. Peran Distributif, peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran Stabilitatif, peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam disequilibrium.
4. Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal pemerintah mencapai stabilitas ekonomi. Sebagai sebuah Organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda perekonomian sehari-hari tetapi juga membiayai kegiatan ekonominya. Badan Pusat Statistik (BPS; 2005) membagi pengeluaran Pemerintah menjadi 3 jenis pengeluaran yaitu :

1. Belanja administrasi Umum
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
3. Belanja Modal.

Dimana ketiga jenis pengeluaran tersebut diatas masing-masing dibagi lagi menjadi 2 yaitu belanja aparatur dan belanja untuk pelayanan publik.

Semakin besar dan banyak investasi yang dilakukan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang akan dikeluarkan. Dimana modal ini diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah biasanya lewat pajak, ekspor, retribusi, laba perusahaan daerah dan lain-lain.

2.1.4 Keterkaitan PMA dengan kesempatan kerja

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: 1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

PMA sebagai salah satu jenis penanaman modal yang memiliki peran sangat besar dalam pembangunan. Modal ini masuk dalam bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* dan *de jure* melakukan pengawasan atas aset yang ditanam di negara tersebut. Sedangkan investasi tidak langsung

(investasi portofolio) dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi tetapi penguasaan atas saham tersebut tidak sama dengan hak mengendalikan perusahaan karena para pemegang saham hanya mempunyai hak atas deviden yang diperoleh (Jhingan; 1994).

Menurut Arsyad (1999) hasil produksi yang optimal di suatu daerah berarti membawa pengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja, dimana dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan produksi suatu daerah maka daerah tersebut akan keluar dari lingkaran kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat daerah tersebut akan meningkat pula.

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar (Mulyadi,2000), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1997).

Peranan PMA bagi kelangsungan pembangunan nasional sangat penting karena dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan bagi investasi tidak mungkin cukup apabila hanya dari sektor pemerintah dan swasta saja yang diharapkan. Dengan hal ini diupayakan berbagai cara agar dapat mendorong semaksimal mungkin menarik PMA masuk ke Indonesia.

Salah satu ciri negara berkembang seperti Indonesia adalah modal kurang atau tabungan rendah, sehingga persediaan modal yang sangat kecil

mengakibatkan laju pembentukan modal uang sangat rendah. Laju tabungan yang sangat rendah seperti itu tidak cukup untuk menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat, apalagi untuk menginvestasi proyek-proyek baru akhirnya berdampak pada semakin meningkatnya jumlah pengangguran akibat keterbatasan modal menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.

2.1.5 Keterkaitan Belanja pemerintah di sektor pertanian dengan kesempatan kerja.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Untuk membiayai kegiatan-kegiatannya pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran. Pengeluaran tersebut tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.

Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyedia sarana prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Pengeluaran pemerintah dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, Pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan terbelakang.

Teori Musgrave dan Rostow mengatakan bahwa Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll, Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang, Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb. Teori ini merupakan pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu, selain itu tidak jelas apakah akan terjadi pertumbuhan ekonomi dalam tahap demi tahap atau akan terjadi dalam beberapa tahap secara simultan.

Teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar, Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat

Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun

pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.

Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Wagner mengatakan bahwa, Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut.

Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dll

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, tentunya pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya . Pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui multiplier effect dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat sehingga membutuhkan faktor produksi dalam hal ini tenaga kerja yang lebih banyak, hal ini kemudian mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar yang diikuti oleh peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.6 Keterkaitan Output Sektor Industri dengan Kesempatan Kerja

Konsep dasar teori produksi sangat diperlukan bagi berbagai pihak, terutama pihak produsen untuk menentukan bilamana output dapat memberikan maksimum laba. Beberapa informasi yang perlu diketahui produsen antara lain

permintaan output maupun informasi ketersediaan berbagai input guna mendukung proses output. Demikian pula alternatif penggunaan input dan bahkan pengorbanan terhadap sesuatu output guna kepentingan output lainnya.

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasi berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis antara input dan output tersebut dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik merupakan fungsi produksi. Jadi, fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input tertentu. Dalam ilmu ekonomi istilah produksi mencakup jenis aktivitas yang jauh lebih luas dibanding pengertian sehari-hari. Menurut konteks ini produksi dapat diartikan sebagai hubungan fisik antar masukan (input) dan keluaran (output). Pengertian seperti ini sering disebut sebagai "proses produksi". Fungsi yang menggambarkan keadaan seperti itu dinamakan "fungsi produksi". Unsur-unsur ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah produksi ini diantaranya adalah pendapatan sekaligus berhubungan dengan laba/rugi, biaya produksi, efisiensi, produktivitas, dll

Nilai output merupakan hasil produksi yang diperoleh dalam menjalankan usaha pada kurun waktu tertentu atau biasa disebut dengan produksi. Nilai output dari kegiatan industri dapat berupa barang berupa barang jadi (final goods) dan barang-barang dalam pengerjaan (work-in process). Dan adapula yang berbentuk jasa yang diberikan kepada pihak lain. Untuk mendapatkan nilai output diperoleh dengan mengalikan barang yang dihasilkan dengan harga perunit masing – masing.

Selain itu peran penyerapan tenaga kerja, dalam hal ini adalah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan, dari segi jumlahnya jika semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka akan semakin banyak *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi tersebut. Meskipun hal tersebut hanya berlaku sampai titik tertentu karena dibatasi oleh *The Law of Diminishing Return*.

2.2 Studi Empiris

Model logaritma natural telah banyak diterapkan untuk mengestimasi beberapa model yang meneliti tentang "Penyerapan Tenaga Kerja". Diantaranya studi yang dilakukan oleh :

Henky Irsan (1993), Dalam studinya yang berjudul Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Indonesia, dengan menggunakan analisis regresi linear berganda secara OLS (*Ordinary Least Square*) pengujian statistik menunjukkan kemaknaan (signifikan) yang sangat berarti untuk variabel upah, modal dan nilai tambah mempunyai signifikasi pada tingkat 1 persen yang berarti bahwa 99 persen kebenaran daripada variabel upah, modal dan nilai tambah dapat dipercaya, sementara untuk kemajuan teknologi pada tingkat 10 persen yang berarti kebenaran daripada kemajuan teknologi dapat dipercaya. Dari hasil estimasi tersebut maka variabel upah (w), modal (k), dan nilai tambah (Va) berpengaruh secara signifikan terhadap input tenaga kerja (L). Model Penelitian Henky Irsan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Irwan Ernaro (2001), disimpulkan bahwa variabel modal, mempunyai pengaruh yang signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil makanan dan minuman.

Untuk variabel nilai tambah mempunyai pengaruh yang signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil makanan dan minuman.

Sianturi (2009) dalam Jurnal Ekonomi, dengan Judul “ Pengaruh Investasi dan Konsumsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Sumatera Utara ”. Dia menjelaskan bahwa variabel PMDN, PMA, dan konsumsi ternyata berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien variabel PMDN berpengaruh positif karena hasil analisisnya menunjukkan koefisien regresi sebesar 19222.65, artinya jika terjadi penambahan PMDN sebesar 1 milyar rupiah , maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 19223 orang. Sedangkan variabel Konsumsi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja karena koefisien regresinya sebesar 2419.00. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan tingkat konsumsi sebesar 1 milyar rupiah, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 2420 orang.

Desky Syahroel (2007) dengan judul penelitian ” Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi produksi padi di Kabupaten Aceh Tenggara” Mengemukakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi produksi padi yaitu luas lahan (X1), jumlah pekerja (X3), berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi, sedangkan pestisida (X5) juga berpengaruh signifikan tetapi pestisida pengaruhnya negatif. Waktu kerja (X2), pupuk (X4) dan benih (X6) walaupun mempunyai tanda positif tetapi tidak signifikan dalam memproduksi padi sawah di kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan suatu asumsi bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor internal yaitu tingkat

upah, produktivitas tenaga kerja dan modal sedangkan faktor eksternal dianggap tetap, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas, modal dan Non upah. Perubahan tingkat upah/gaji akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dengan semakin tinggi tingkat upah/gaji maka pihak perusahaan akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja.

Sebab, hubungan negatif yang terjadi antara tingkat upah/gaji dengan jumlah tenaga kerja adalah merupakan salah satu bentuk upaya pengalokasian faktor produksi secara efisien yang memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, sehingga apabila terjadi penurunan tingkat upah maka dana yang ada akan dialokasikan untuk faktor produksi lain yang dapat menghasilkan nilai margin yang sama besarnya. Selain itu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dilakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka produksi akan mendapat keuntungan karena hasil produksi semakin tinggi. Dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara penambahan modal terhadap setiap industri akan dapat meningkatkan bahan baku atau dapat mengembangkan usaha (menambah jumlah usaha).

Hal ini dimaksudkan dengan semakin banyak usaha yang berkembang atau berdiri maka dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Sehingga dari keempat variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh sektor industri kecil.

2.3 Kerangka Pikir

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi sangat penting dilakukan oleh setiap wilayah, tidak hanya sekedar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya. Namun, tidak semua proses pembangunan dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan rencana. Hal ini dikarenakan terdapat permasalahan yang membuat pembangunan ekonomi menjadi terhambat.

Permasalahan mendasar yang seringkali dihadapi oleh suatu wilayah tak terkecuali ialah masalah di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja, sementara pertumbuhan jumlah kesempatan kerja yang ada tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran semakin meningkat. Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi mengharuskan Pemerintah untuk menyediakan dan memperluas lapangan kerja yang diperuntukkan bagi angkatan kerja tersebut.

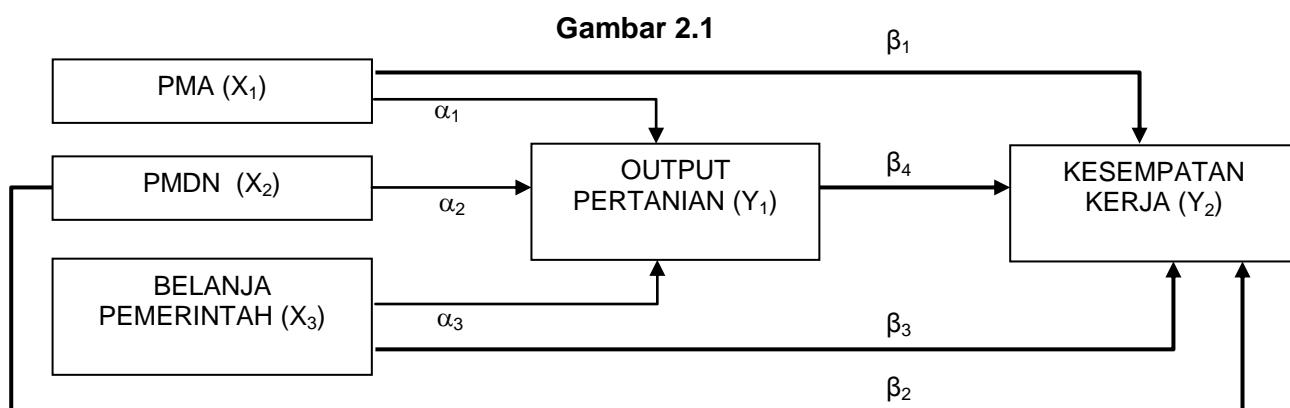
Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu dengan meningkatkan lapangan kerja atau sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan salah satunya ialah sector Pertanian.

Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk golongan miskin adalah sangat ironis terjadi di Indonesia. Hal ini

mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian keseluruhan. Disisi lain adanya peningkatan investasi dalam pertanian yang dilakukan oleh investor PMA dan PMDN yang berorientasi pada pasar ekspor umumnya padat modal dan peranannya kecil dalam penyerapan tenaga kerja atau lebih banyak menciptakan buruh tani.

Berdasarkan latar belakang tersebut ditambah dengan kenyataan justru kuatnya aksesibilitas pada investor asing /swasta besar dibandingkan dengan petani kecil dalam pemanfaatan sumberdaya pertanian di Indonesia, maka dipandang perlu adanya grand strategy pembangunan pertanian melalui pemberdayaan petani kecil. Melalui konsepsi tersebut, maka diharapkan mampu menumbuhkan sektor pertanian, sehingga pada gilirannya mampu menjadi sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia,

Oleh karena itu, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi maka diperlukan suatu upaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyerapan kesempatan kerja pada sektor industri seperti Upah, PMA, PMDN, dan Nilai Output sektor Industri,. Selain itu untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor tersebut terhadap proses kesempatan kerja pada sektor industri. Adapun pemikiran penelitian disajikan pada



2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pendapat atau teori yang masih kurang sempurna. Dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan yang belum final dalam arti masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Selanjutnya hipotesis dapat diartikan juga sebagai dugaan pemecahan masalah yang bersifat sementara yakni pemecahan masalah yang mungkin benar dan mungkin salah (Hadari Nawawi,2001).

Berdasarkan hal diatas maka dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Diduga Tingkat PMA, PMDN, dan Belanja pemerintah pada sektor pertanian, berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kesempatan kerja di sektor pertanian melalui output sektor pertanian Sulawesi Selatan Periode 2001-2010”